

SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menyusun standar operasional prosedur untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat yang mengurus perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta disebutkan Standar Operasional Prosedur lintas Perangkat Daerah disahkan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Didelegasikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;



4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Didelegasikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,


ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 321 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	NOMOR SOP	321/SOP/2023
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	
	DISAHKAN OLEH	Pj WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd SINGGIH RAHARJO
	NAMA SOP	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Didelegasikan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. PD/Unit Kerja teknis 3. Pemohon



KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN										
1. SOP teknis pada PD/Unit Kerja (<i>menyesuaikan dengan jenis permohonan izin dan non perizinan yang dibutuhkan oleh pemohon</i>)	<table border="0"> <tr> <td>1. Komputer, Printer, dan Scanner</td> <td>6. Meja, Kursi</td> </tr> <tr> <td>2. Alat tulis kantor</td> <td>7. Internet</td> </tr> <tr> <td>3. Peralatan kantor</td> <td>8. Akun Verifikator</td> </tr> <tr> <td>4. Ruang front-office, Ruang back-office, Ruang Rapat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Telepon/Faksimili</td> <td></td> </tr> </table>	1. Komputer, Printer, dan Scanner	6. Meja, Kursi	2. Alat tulis kantor	7. Internet	3. Peralatan kantor	8. Akun Verifikator	4. Ruang front-office, Ruang back-office, Ruang Rapat		5. Telepon/Faksimili	
1. Komputer, Printer, dan Scanner	6. Meja, Kursi										
2. Alat tulis kantor	7. Internet										
3. Peralatan kantor	8. Akun Verifikator										
4. Ruang front-office, Ruang back-office, Ruang Rapat											
5. Telepon/Faksimili											
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN										
Ketidacermatan dan ketidaktelitian dalam memverifikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon akan berdampak pada tidak dapat diterbitkannya produk perizinan/ non perizinan dengan alasan dokumen permohonan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila produk perizinan/non perizinan sudah diterbitkan maka produk tersebut dapat dicabut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan perizinan/non perizinan dilakukan melalui laman perizinanonline.jogjakota.go.id 2. Penerbitan perizinan/non perizinan berdasarkan pada hasil rekomendasi teknis atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh PD/Unit Kerja teknis sesuai dengan tugas dan fungsi terkait. 										



No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PEMOHON	DPMP TSP	PD/UNIT KERJA TEKNIS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengajukan permohonan secara online melalui https://perizinanonline.jogjakota.go.id dengan mengunggah berkas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis				Menyesuaikan dengan persyaratan teknis sesuai dengan perizinan/ non perizinan yang diajukan.		Permohonan terinput dalam aplikasi sesuai dengan jenis perizinan/non perizinan.	
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen secara administrasi terhadap dokumen yang telah diunggah oleh pemohon melalui laman https://perizinanonline.jogjakota.go.id	Tidak			Kelengkapan Administrasi sesuai dengan perizinan/non perizinan yang diajukan.		Tanda terima pendaftaran.	Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan penghitungan waktu layanan akan dihentikan. Penghitungan waktu layanan akan berjalan kembali setelah pemohon melengkapi dokumen persyaratan pada sistem
3.	Menyerahkan dokumen teknis permohonan perizinan/non perizinan dari pemohon kepada PD/Unit Kerja teknis untuk dilakukan verifikasi teknis dan proses lebih lanjut.			Tidak	Kelengkapan dokumen teknis sesuai dengan jenis permohonan perizinan/non perizinan yang diajukan oleh pemohon.	Maksimal 1 hari kerja	Dokumen teknis tersampaikan kepada PD/Unit Kerja teknis.	
4.	Memproses surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya.				Kelengkapan dokumen teknis sesuai dengan jenis permohonan perizinan/non perizinan.	Sesuai jenis perizinan/nonperizinan yang diajukan.		Rincian proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. PD Teknis menerima notifikasi kelengkapan dokumen permohonan perizinan/non perizinan pemohon dari DPMP TSP melalui laman https://perizinanonline.jogjakota.go.id 2. PD Teknis melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan teknis. 3. PD Teknis menyusun surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya menyesuaikan dengan waktu pada masing-masing jenis layanan (daftar waktu terlampir). 4. Kegiatan peninjauan lapangan/kajian/paparan dan sejenisnya dapat dilakukan oleh PD Teknis terkait apabila diperlukan sebagai syarat penerbitan surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya. 5. PD Teknis menyerahkan surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya kepada DPMP TSP sebagai dasar penerbitan izin.



5.	Menerima surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya dari PD/Unit Kerja Teknis untuk selanjutnya DPMPTSP memproses penerbitan perizinan/non perizinan kemudian disampaikan kepada pemohon.				Surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya dari PD/Unit Kerja Teknis	Maksimal 3 hari kerja	Dokumen perizinan/non perizinan	Surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya yg menjadi kewenangan pengesahan dari PD teknis ketika sudah diterbitkan oleh PD teknis dan diunggah di sistem, maka DPMPTSP segera memproses penerbitan perizinan/non perizinan berdasarkan surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis tersebut.
6.	Menerima surat penerbitan izin dari DPMPTSP				Dokumen perizinan/non perizinan		Dokumen perizinan/non perizinan tersampaikan kepada pemohon	



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Keterangan:

Proses surat/rekomendasi teknis/persetujuan/dokumen sejenis lainnya memerlukan waktu yang berbeda pada tiap jenis layanan dengan daftar waktu sebagai berikut:

No.	PD Teknis yang mengampu	Jenis Perizinan dan Nonperizinan		Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan PD Teknis	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan DPMPSTP	Waktu PD Teknis (Maksimal ... Hari Kerja)	Waktu DPMPSTP (Maksimal ... Hari Kerja)	Total Waktu (Maksimal ... Hari Kerja)
1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	uji kelayakan proteksi kebakaran	rekomendasi uji kelayakan proteksi kebakaran	uji kelayakan proteksi kebakaran	14	4	18
		2	persetujuan instalasi proteksi kebakaran	rekomendasi instalasi proteksi kebakaran	persetujuan instalasi proteksi kebakaran	3	4	7
		3	manajemen keselamatan kebakaran gedung	surat keterangan manajemen keselamatan kebakaran gedung	persetujuan manajemen keselamatan kebakaran gedung	3	4	7
2	Dinas Kebudayaan	4	pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah kawasan malioboro 2	rekomendasi teknis pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah kawasan malioboro 2	persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah	6	4	4
3	Dinas Perhubungan	5	izin juru parkir	rekomendasi izin juru parkir	izin juru parkir	6	4	10
		6	dispensasi jalan	rekomendasi teknis dispensasi jalan	izin dispensasi jalan	3	4	7
		7	operasional kendaraan tidak bermotor	rekomendasi teknis operasional kendaraan tidak bermotor	izin operasional kendaraan tidak bermotor	1	4	5
		8	persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir swasta	rekomendasi teknis pengelolaan tempat khusus parkir swasta	persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir swasta	6	4	10
		9	persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah	rekomendasi teknis pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah	persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah	6	4	10
		10	izin insidentil	rekomendasi teknis izin insidentil	izin insidentil	3	4	7
		11	persetujuan peremajaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum	rekomendasi teknis surat persetujuan peremajaan kendaraan bermotor angkutan umum	persetujuan peremajaan kendaraan bermotor angkutan umum	6	4	10
4	Dinas Lingkungan Hidup	12	pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL-UPL	rekomendasi pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL-UPL	pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL-UPL	10	4	14



No.	PD Teknis yang mengampu	Jenis Perizinan dan Nonperizinan	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan PD Teknis	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan DPMPSTP	Waktu PD Teknis (Maksimal ... Hari Kerja)	Waktu DPMPSTP (Maksimal ... Hari Kerja)	Total Waktu (Maksimal ... Hari Kerja)	
		13	keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib amdal	rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib amdal	keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib amdal	240	4	244
		14	persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup	rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup	persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup	10	4	14
		15	persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup	Rekomendasi persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup	persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup	10	4	14
		16	izin penebangan pohon dan pemindahan taman	rekomendasi teknis izin penebangan pohon dan pemindahan taman	izin penebangan pohon dan pemindahan taman	4	4	8
		17	persetujuan armada angkutan sampah	rekomendasi teknis armada angkutan sampah	persetujuan armada angkutan sampah	5	4	9
		18	persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik	rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik	persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik	14	4	18
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	19	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bangunan gedung	telaah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	8	4	12
		20	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang reklame	telaah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang reklame	9	4	13
		21	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang infrastruktur pasif telekomunikasi	telaah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	9	4	13
		22	izin perubahan penggunaan tanah	rekomendasi teknis izin perubahan penggunaan tanah	izin perubahan penggunaan tanah	15	4	19
		23	rekomendasi pemanfaatan tanah negara	telaah rekomendasi pemanfaatan tanah negara	rekomendasi pemanfaatan tanah negara	9	4	13
6	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24	persetujuan operasional lembaga pelatihan kerja pemerintah	rekomendasi teknis persetujuan operasional lembaga pelatihan kerja pemerintah	persetujuan operasional lembaga pelatihan kerja pemerintah	7	4	11
		25	izin pengumpulan uang atau barang	rekomendasi teknis izin pengumpulan uang atau barang	izin pengumpulan uang atau barang	10	4	14
		26	tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial	rekomendasi teknis operasional lembaga kesejahteraan sosial	tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial	10	4	14



No.	PD Teknis yang mengampu	Jenis Perizinan dan Nonperizinan		Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan PD Teknis	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan DPMPSTP	Waktu PD Teknis (Maksimal ... Hari Kerja)	Waktu DPMPSTP (Maksimal ... Hari Kerja)	Total Waktu (Maksimal ... Hari Kerja)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27	surat keterangan penelitian	rekomendasi teknis surat keterangan penelitian oleh badan kesatuan bangsa dan politik dan badan perencanaan dan pembangunan daerah	surat keterangan penelitian	3	4	7
		28	izin kuliah kerja nyata	rekomendasi teknis izin kuliah kerja nyata	izin kuliah kerja nyata	3	4	7
8	Dinas Pendidikan	29	izin operasional lembaga pendidikan formal	rekomendasi teknis operasional lembaga pendidikan formal	izin operasional lembaga pendidikan formal	7	4	11
		30	izin operasional lembaga pendidikan nonformal	rekomendasi teknis operasional lembaga pendidikan nonformal	izin operasional lembaga pendidikan nonformal	14	4	18
9	Dinas Pertanian dan Pangan	31	izin jagal	rekomendasi teknis izin jagal	izin jagal	2	4	6
		32	surat izin praktik dokter hewan	rekomendasi teknis surat izin praktik dokter hewan.	surat izin praktik dokter hewan.	8	4	12
		33	Surat izin praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	Rekomendasi teknis surat izin praktik Dokter Hewan WNA	Surat izin praktik Dokter Hewan WNA	8	4	12
		34	izin penyimpanan daging	rekomendasi teknis penyimpanan daging	izin penyimpanan daging	3	4	7
		35	izin penggilingan daging	rekomendasi teknis penggilingan daging	izin penggilingan daging	3	4	7
		36	izin penjualan daging	rekomendasi teknis penjualan daging	izin penjualan daging	3	4	7
		37	surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan	rekomendasi izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan.	surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan	8	4	4
		38	surat izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminasi Buatan	Rekomendasi paramedik veteriner pelayanan inseminasi buatan	Surat izin paramedik pelayanan veteriner inseminasi	8	4	4
		39	surat izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	rekomendasi paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan	surat izin Paramedik Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	8	4	4
		40	surat izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi	rekomendasi paramedik veteriner pelayanan	surat izin paramedik pelayanan veteriner Asisten Teknik Reproduksi	8	4	4
		41	izin dokter hewan praktik mandiri	rekomendasi izin dokter hewan praktik mandiri	izin dokter hewan praktik mandiri	8	4	4
10	Dinas Perdagangan	42	persetujuan penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C	rekomendasi teknis persetujuan penjualan langsung minuman beralkohol golongan B	persetujuan penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C	3	4	7



No.	PD Teknis yang mengampu	Jenis Perizinan dan Nonperizinan	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan PD Teknis	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan DPMPSTP	Waktu PD Teknis (Maksimal ... Hari Kerja)	Waktu DPMPSTP (Maksimal ... Hari Kerja)	Total Waktu (Maksimal ... Hari Kerja)	
			dan golongan C					
		43	persetujuan operasional toko swalayan	rekomendasi teknis persetujuan operasional toko swalayan	persetujuan operasional toko swalayan	3	4	7
		44	persetujuan kajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat	rekomendasi teknis kajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat	persetujuan kajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat	3	4	7
		45	izin juru parkir kawasan pasar	rekomendasi izin juru parkir	izin juru parkir	6	4	4
		46	pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah kawasan pasar	rekomendasi teknis pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah kawasan pasar	persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah	6	4	4
11	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	47	izin pembuatan jalan masuk (in gang)	rekomendasi teknis pembuatan jalan masuk (in gang)	izin pembuatan jalan masuk (in gang)	7	4	11
		48	persetujuan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum	rekomendasi teknis persetujuan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum	persetujuan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum	14	4	18
		49	persetujuan pemakaman untuk pengelolaan krematorium milik swasta	rekomendasi teknis pemakaman untuk pengelolaan krematorium milik swasta	persetujuan pemakaman untuk pengelolaan krematorium milik swasta	14	4	18
		50	izin penyimpanan abu jenazah milik swasta	rekomendasi teknis izin penyimpanan abu jenazah milik swasta	izin penyimpanan abu jenazah milik swasta	14	4	18
		51	izin penyambungan saluran air hujan	rekomendasi teknis penyambungan saluran air hujan	izin penyambungan saluran air hujan	5	4	9
		52	izin saluran air limbah	rekomendasi teknis saluran air limbah	izin saluran air limbah	7	4	11
12	Dinas Kesehatan	53	surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis	rekomendasi surat izin praktik tenaga kesehatan	surat izin praktik tenaga kesehatan	9	4	13
		54	surat terdaftar penyehat tradisional	rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional	surat terdaftar penyehat tradisional	9	4	13



No.	PD Teknis yang mengampu	Jenis Perizinan dan Nonperizinan	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan PD Teknis	Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan DPMPSTP	Waktu PD Teknis (Maksimal ... Hari Kerja)	Waktu DPMPSTP (Maksimal ... Hari Kerja)	Total Waktu (Maksimal ... Hari Kerja)	
		55	izin usaha mikro obat tradisional	sertifikat standar	izin usaha mikro obat tradisional	9	4	13
		56	pembetulan surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	surat keterangan pembetulan surat izin praktik	pembetulan surat izin praktik tenaga kesehatan	8	4	12
		57	pencabutan surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	rekomendasi pencabutan surat izin praktik	surat keterangan pencabutan surat izin praktik tenaga kesehatan	8	4	12
		58	izin klinik pemerintah non Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah	rekomendasi sertifikat standar	sertifikat standar	8	4	12
13	Perangkat Daerah	59	izin praktek kerja lapangan	rekomendasi teknis izin praktek kerja lapangan	izin praktek kerja lapangan	3	4	7
14	Kemantren	60	persetujuan pondokan atau izin pondokan	rekomendasi teknis persetujuan pondokan	persetujuan pondokan	4	4	8
		61	persetujuan pedagang kaki lima atau izin pedagang kaki lima	rekomendasi teknis persetujuan pedagang kaki lima	persetujuan pedagang kaki lima	4	4	8

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektror yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

SINGGIH RAHARJO